



**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI**

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Audited

Per 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/ atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan laporan ini, realisasi **Pendapatan dan Hibah** untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.202.641.000,00** dari target Pendapatan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA TA 2019 sebesar **Rp.510.150.000,00** . atau **39,72 %** Sementara itu, realisasi **Belanja Tidak Langsung** berupa Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS adalah sebesar **Rp.15.098.434.830,00** atau **85,48 %** dari pagu Belanja yang dianggarkan sebesar **Rp.17.662.162.227,00** sedangkan realisasi **Belanja Langsung** adalah sebesar **Rp.21.409.974.248,00** atau **89,69 %** dari pagu Belanja yang dianggarkan dalam DPA TA 2019 sebesar **Rp.23.913.718.220,00**.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp.28.083.983.412,78** dan Kewajiban sebesar **Rp.42.522.713,00** sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.28.083.983.412,78**.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, Januari 2020

Pjt. KEPALA DINAS,
PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN
DAN
PRO
PARIWISATA
DR. SRI BURNAMA SYAM, S.ST.M.Sn
Pembina Tk
NIP. 19690101 199403 2010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1	
DAFTAR ISI	3	
DAFTAR TABEL	5	
DAFTAR GRAFIK	6	
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	7	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	8	
NERACA	9	
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	10	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	11	
RINGKASAN	12	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16	
BAB I	Pendahuluan	16
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	17
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	18
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.	20
	2.1. Ekonomi Makro	20
	2.2. Kebijakan Keuangan	20
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	21
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD	23
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	23
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	25
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	27
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	27
	4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	27
	4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD	28
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	28

BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	36
	5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	36
	5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran	36
	5.1.2. Neraca	39
	5.1.3. Laporan Operasional	40
	5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas	41
	5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD	42
	5.2.1. Aset Lancar	42
	5.2.2. Aset Tetap	44
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD	49
BAB VII	Penutup	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	13
Tabel 2	Perbandingan Neraca 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	15
Tabel 3	Perbandingan Belanja Per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	23
Tabel 4	Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2019	36
Tabel 5	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	37
Tabel 6	Rincian Belanja per Sumber Dana TA 2019 dan 2018	38
Tabel 7	Pengembalian Belanja (SSP) Tahun Anggaran 2019 per Jenis Belanja	38
Tabel 8	Perbandingan Neraca 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	40
Tabel 9	Perbandingan Laporan Operasional (LO) 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	41
Tabel 10	Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	42
Tabel 11	Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	43
Tabel 12	Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	43
Tabel 13	Perbandingan Aset Tetap per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	44
Tabel 14	Perbandingan Aset pada Neraca dan Aset Tetap dalam Buku Inventarisasi Aset per 31 Desember 2019	45
Tabel 15	Peralatan dan Mesin	45
Tabel 16	Gedung dan Bangunan	46
Tabel 17	Jalan, Jaringan dan Instalasi	46
Tabel 18	Aset Tetap Lainnya	47
Tabel 19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	47
Tabel 20	Akumulasi Penyusutan	48
Tabel 21	Sumber Daya Disbudpar Provinsi Jambi	57
Tabel 22	Jumlah PNS di Lingkungan Disbudpar (Berdasarkan Pangkat dan Jenis Kelamin)	58
Tabel 23	Jumlah PNS di Lingkungan Disbudpar (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	58
Tabel 24	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Provinsi Jambi berdasarkan Daerah Tujuan Dalam Provinsi Jambi	65
Tabel 25	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) ke Provinsi Jambi berdasarkan daerah tujuan dalam Provinsi Jambi	67
Tabel 26	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Gabungan)	69
Tabel 27	Objek Daya Tarik Wisata Provinsi Jambi per Kategori Tahun 2019	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan LRA TA 2019 dan 31 Des 2018	14
Grafik 2	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019	37
Grafik 3	Komposisi Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2019	39
Grafik 4	Grafik Komposisi Neraca	40
Grafik 5	Komposisi Aset Tetap per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018	44
Grafik 6	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara ke Provinsi Jambi	66
Grafik 7	Daerah-daerah yang paling banyak di kunjungi wisatawan Manca Negara (Wisman) Periode Tahun 2019	66
Grafik 8	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi Jambi	68
Grafik 9	Daerah-daerah yang paling banyak di kunjungi Wisatawan Nusantara	68

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI**

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (LO), (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS,


DR. SRI PURNAMA SYAM, S.STM.Sn
Pembina Tk
NIP. 19690101 199403 2010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2.16 Kebudayaan Unit Organisasi : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72	245.817.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72	245.817.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72	245.817.000,00
5	BELANJA	41.575.880.447,00	36.547.409.078,00	87,91	29.986.311.601,00
5.1	BELANJA OPERASI	37.046.950.047,00	33.114.519.914,00	89,39	27.134.932.402,00
5.1.1	Belanja Pegawai	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48	13.748.270.861,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.384.787.820,00	17.977.085.084,00	92,74	13.386.661.541,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	4.528.930.400,00	3.432.889.164,00	75,80	2.851.379.199,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.590.000,00	272.993.000,00	92,67	388.318.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.986.940.400,00	3.082.496.164,00	77,31	1.942.600.699,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Ingsi dan Jaringan	170.000.000,00	0,00	0,00	29.560.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	77.400.000,00	77.400.000,00	100,00	490.900.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.065.730.447,00)	(36.344.768.078,00)	88,50	(29.740.494.601,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(41.065.730.447,00)	(36.344.768.078,00)	88,50	(29.740.494.601,00)

Jambi, 31 Desember 2019

PENGUNA ANGGARAN

Dr. SRI PURNAMA SYAM, SST, M.Sn
 NIP. 1969010199403 2 010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dan 1

NERACA



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Urusan Pemerintahan : 2 . 16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	
Unit Organisasi : 2 . 16 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penemuan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	8.389.550,00	4.533.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	8.389.550,00	4.533.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	14.282.751.607,43	13.988.655.837,43
Gedung dan Bangunan	17.661.860.389,00	14.158.323.725,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	504.509.368,00	504.509.368,00
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.584.725.028,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.942.550.704,22)	(14.829.871.844,62)
JUMLAH ASET TETAP	20.747.655.188,21	18.406.342.113,81
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57
Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00

NERACA

Halaman 1 dan 2

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 16	Kebudayaan
Unit Organisasi : 2 . 16 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	(17,56)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	(17,56)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	(17,56)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	34.220.576.225,60	28.833.895.919,89	5.386.680.305,71	18,68
9.1.1	Beban Pegawai - LO	15.098.434.830,00	13.748.270.861,00	1.350.163.969,00	9,82
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	17.970.462.536,00	13.392.086.787,00	4.578.375.749,00	34,19
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.112.678.859,60	1.693.538.271,89	(580.859.412,29)	(34,30)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(34.017.935.225,60)	(28.588.078.919,89)	(5.429.856.305,71)	18,99
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(34.017.935.225,60)	(28.588.078.919,89)	(5.429.856.305,71)	18,99
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.017.935.225,60)	(28.588.078.919,89)	(5.429.856.305,71)	18,99

Jambi, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN



Dr. SRI PURNAMA SYAMSIST, M.Sn

NIP. 196901011994032010

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 16	Kebudayaan	
Unit Organisasi : 2 . 16 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	25.693.525.077,38	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(34.017.935.225,60)	(28.588.078.919,89)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	21.102.770,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	36.344.768.078,00	0,00
EKUITAS AKHIR	28.041.460.699,78	(28.588.078.919,89)

Jambi, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN



Dr. SRI PURNAMA SYAH, SST, M.Sn

NIP. 19690101 199403 2 010

RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan dan Hibah pada Tahun Anggaran 2019 seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp.202.641.000,00** yang telah ditargetkan dalam TA 2019 sebesar **Rp.510.150.000,00**.

Realisasi **Belanja Tidak Langsung** (Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS) sebesar **Rp.15.098.434.830,00** atau mencapai **85,48 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.17.662.162.227,00**. **Belanja Langsung** pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp.21.409.974.248,00** atau mencapai **89,54 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.23.913.718.220,00**. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp.1.376.013.900,00** atau **94,88 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.1.450.296.000,00** Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.16.601.071.184,00** atau **92,57 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.17.934.491.820,00**, Belanja Modal sebesar **Rp.3.432.889.164,00** atau **75,80 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp.4.528.930.400,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

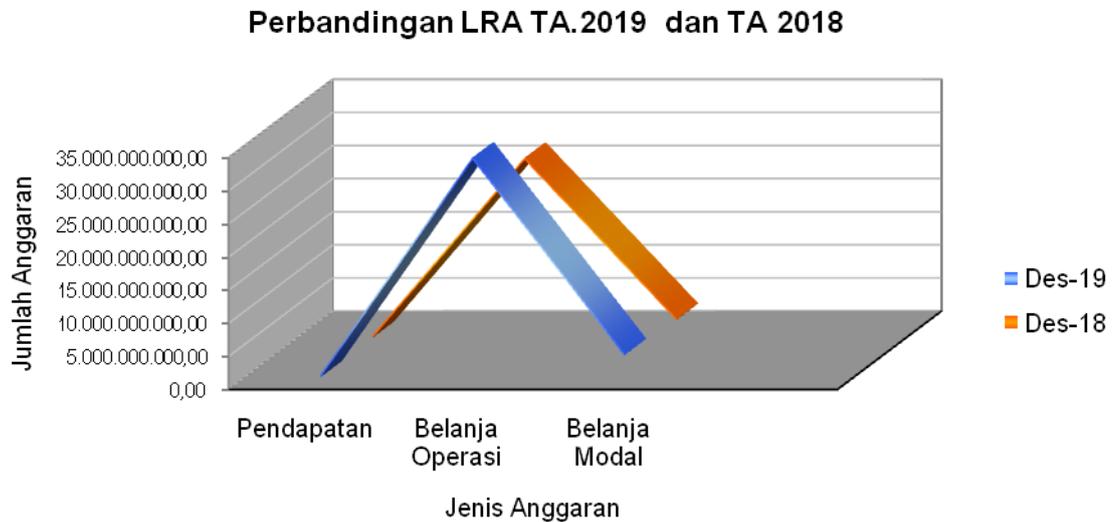
Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-19			31-Des-18		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Hasil Retribusi Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Retribusi Jasa Usaha	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
Penyewaan Tanah dan Bangunan	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
JUMLAH PENDAPATAN	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
BELANJA	41.575.880.447,00	36.508.409.078,00	87,81%	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48%	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%
Belanja Pegawai	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48%	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%
Belanja Gaji dan Tunjangan	9.892.327.383,00	8.454.439.003,00	85,46%	9.533.978.911,00	8.776.340.376,00	92,05%
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	7.750.389.640,00	6.693.440.500,00	86,36%	7.477.272.361,00	7.249.407.700,00	96,95%
Tunjangan Keluarga	651.162.100,00	592.146.622,00	90,94%	635.280.098,00	587.067.113,00	92,41%
Tunjangan Jabatan	401.097.106,00	319.400.000,00	79,63%	391.314.250,00	300.020.000,00	76,67%
Tunjangan Fungsional	70.160.000,00	59.800.000,00	85,23%	41.596.503,00	3.835.000,00	9,22%
Tunjangan Fungsional Umum	313.736.100,00	233.460.000,00	74,41%	306.084.000,00	288.110.000,00	94,13%
Tunjangan Beras	384.372.095,00	304.236.420,00	79,15%	374.997.166,00	352.902.660,00	94,11%
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	10.372.538,00	8.597.690,00	82,89%	7.112.931,00	3.603.173,00	50,66%
Pembulatan Gaji	140.125,00	83.880,00	59,86%	136.707,00	100.231,00	73,32%
Iuran Asuransi Kesehatan	234.256.250,00	186.887.628,00	79,78%	227.070.330,00	202.546.551,00	89,20%
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	19.517.041,00	13.683.860,00	70,11%	19.041.016,00	14.903.466,00	78,27%
Belanja Jaminan Kematian	57.124.388,00	42.702.403,00	74,75%	26.651.728,00	18.767.561,00	70,42%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.769.834.844,00	6.643.995.827,00	85,51%	5.314.684.984,00	4.971.930.485,00	93,55%
Tambahan Penghasilan Berdsrkan Beban Kerja	7.769.834.844,00	6.643.995.827,00	85,51%	5.314.684.984,00	4.971.930.485,00	93,55%
Tambahan Penghasilan Berdsrkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
BELANJA LANGSUNG	23.913.718.220,00	21.409.974.248,00	89,53%	17.643.327.000,00	16.238.040.740,00	92,04%
Belanja Operasi	19.384.787.820,00	17.977.085.084,00	92,74%	14.043.408.200,00	13.386.661.541,00	95,32%
Belanja Pegawai	1.450.296.000,00	1.376.013.900,00	94,88%	1.386.660.000,00	1.344.107.000,00	96,93%
Belanja Barang dan Jasa	17.934.491.820,00	16.601.071.184,00	92,57%	12.656.748.200,00	12.042.554.541,00	95,15%
Belanja Hibah	0,00	39.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00%
BELANJA MODAL	4.528.930.400,00	3.432.889.164,00	75,80%	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%
Belanja Peralatan dan Mesin	294.590.000,00	272.993.000,00	92,67%	448.200.000,00	388.318.000,00	86,64%
Belanja Bangunan dan Gedung	3.986.940.400,00	3.082.496.164,00	77,31%	2.619.268.800,00	1.942.600.699,00	74,17%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53%
Belanja Aset Tetap Lainnya	77.400.000,00	77.400.000,00	100,00%	502.450.000,00	490.900.500,00	97,70%
JUMLAH BELANJA	41.575.880.447,00	36.508.409.078,00	87,81%	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%
SURPLUS / (DEFISIT)	41.065.730.447,00	36.344.768.078,00	88,50%	32.010.990.895,00	29.740.494.601,00	92,91%

Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1
Perbandingan LRA Tahun Anggaran 2019 dan TA.2018



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.28.083.983.412,78** yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : **Rp. 8.389.550,00**
- b. Aset Tetap : **Rp.20.747.655.188,21**
- c. Aset Lainnya : **Rp. 7.327.938.674,57**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.42.522.713,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.28.083.983.412,78** yang terdiri dari :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2
Perbandingan Neraca 31 Des 2019 dan 31 Des 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-19	31-Des-18	KENAIKAN/PENURUNAN
ASET			
Aset Lancar	8.389.550,00	4.533.000,00	3.856.550,00
Aset Tetap	20.747.655.188,21	18.406.342.113,81	2.341.313.074,40
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	28.083.983.412,78	25.738.813.788,38	2.345.169.624,40
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	42.522.713,00	45.288.711,00	(2.765.998,00)
Jumlah Kewajiban	42.522.713,00	45.288.711,00	(2.765.998,00)
EKUITAS			
Ekuitas	28.041.460.699,78	25.693.525.077,38	2.347.935.622,40
Jumlah Ekuitas	28.041.460.699,78	25.693.525.077,38	2.347.935.622,40
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	28.083.983.412,78	25.738.813.788,38	4.690.339.248,80

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja serta penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KASDA.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah adanya kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 13/2006 Pasal 4 ayat (1)). Semangat tersebut harus melekat pada keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban sampai dengan proses evaluasinya.

Menurut PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2019 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai dukungan bagi tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Peraturan Perundang – undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 21);

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD.

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2. Neraca
 - 5.1.3. Laporan Operasional
 - 5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capainnya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

2.2. Kebijakan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sebagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entita pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bandingkan dengan anggaran dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran, termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian realisasi penggunaan dana harus jelas dan tepat sasaran guna mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai.

Realisasi anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.36.344.768.078,00** atau **88,50.%** yang terealisasi untuk membiayai Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) yang telah direncanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam menjalankan program dan kegiatannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja daerah dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi dan diimplementasikan dalam visi dan misi Dinas. Pengelolaan belanja harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan dan memajukan pariwisata serta melestarikan kebudayaan di Provinsi Jambi dan salah satu indikatornya adalah dengan meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Oleh karena itu, dalam pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat tersebut, harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Patokan harga Belanja Daerah dan mengacu kepada anggaran yang berbasis kinerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi melalui APBD Tahun Anggaran 2019 memperoleh alokasi anggaran belanja daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar **Rp. 41.575.880.447,00** dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 17.662.162.227,00** yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Langsung sebesar **Rp 23.913.718.220,00**, merupakan belanja pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat atau publik dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, berupa program dan kegiatan DPA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi atau mengalami kenaikan sebesar **Rp. 6.270.391.220,00** atau **1,35 %** jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar **Rp.17.643.327.000,00**. Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan adanya penambahan alokasi belanja langsung yang cukup signifikan. Dan pemenuhan kebutuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan yang merupakan konsekuensi logis dan bersifat general dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan penambahan jumlah pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk kesejahteraan pegawai (ASN).

Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 23.913.718.220,00** tersebut dapat dirinci untuk Belanja Pegawai **Rp. 1.450.296.000,00**, Belanja Barang dan Jasa **Rp. 17.934.491.820,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 4.528.930.400,00**. Sedangkan terkait dengan belanja langsung, dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, program dan kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dari sisi administrasi dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB. III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2019 melalui APBD Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar **Rp 41.065.730.447,00** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp 37.046.950.047,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp 4.528.930.400,00** yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi Belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 36.344.768.078,00** atau sebesar **88,50 %** dengan perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2018 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Perbandingan Belanja Per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018

Dalam Rupiah

URAIAN	31-Des-19			31-Des-18		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Pendapatan Retribusi Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
JUMLAH PENDAPATAN	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%	481.000.000,00	245.817.000,00	51,11%
BELANJA	41.575.880.447,00	36.547.409.078,00	87,91%	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%
BELANJA OPERASI	37.046.950.047,00	33.114.519.914,00	89,39%	28.892.072.095,00	27.134.932.402,00	93,92%
Belanja Pegawai	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48%	16.235.323.895,00	15.092.377.861,00	92,96%
Belanja Barang	19.384.787.820,00	17.977.085.084,00	92,74%	12.656.748.200,00	12.042.554.541,00	95,15%
Belanja Hibah	0,00	39.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00%
BELANJA MODAL	4.528.930.400,00	3.432.889.164,00	75,80%	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%
Belanja Peralatan dan Mesin	294.590.000,00	272.993.000,00	92,67%	448.200.000,00	388.318.000,00	86,64%
Belanja Bangunan dan Gedung	3.986.940.400,00	3.082.496.164,00	77,31%	2.619.268.800,00	1.942.600.699,00	74,17%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00	29.560.000,00	98,53%
Belanja Aset Tetap Lainnya	77.400.000,00	77.400.000,00	100,00%	502.450.000,00	490.900.500,00	97,70%
JUMLAH BELANJA	41.575.880.447,00	36.547.409.078,00	87,91%	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%
SURPLUS / (DEFISIT)	41.065.730.447,00	36.344.768.078,00	88,50%	32.010.990.895,00	29.740.494.601,00	92,91%

Berkaitan dengan Belanja Langsung, ada beberapa kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran

2019 realisasi atau serapan anggarannya kurang dari **90 %**. kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dikelola oleh Subbag Umum dan Kepegawaian dari jumlah anggaran sebesar Rp. 618.000.000,00 realisasinya sebesar Rp. 544.774.093,00 atau sebesar 88,15 %

Penyebab tidak tercapainya realisasi dikarenakan untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran berdasarkan rekening pemakaian sehingga terjadi penghematan dan efisiensi dari total anggaran yang disediakan.

- b. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang dikelola oleh Subbag Keuangan dan Aset dari jumlah anggaran sebesar Rp. 307.297.000,00 realisasinya sebesar Rp. 136.996.000,00 atau sebesar 44,58 %

Penyebab tidak tercapainya realisasi dikarenakan untuk kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor pada Tahun 2019 dianggarkan pemeliharaan instalasi Listrik Gedung yang berlokasi di Ex.Arena MTQ, tidak dapat direalisasikan yang disebabkan oleh Gedung milik Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang berada di Arena Ex.MTQ tidak dilakukan pemeliharaan atau renovasi.

- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dikelola oleh Subbag Program dari jumlah anggaran sebesar Rp. 230.484.000,00 realisasinya sebesar Rp. 198.810.572,00 atau sebesar 86,26 %

Penyebab tidak tercapainya realisasi dikarenakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi terdapat efisiensi, Monev dilakukan untuk Program dan Kegiatan yang perlu tindak lanjut bukan memonitoring kegiatan yang telah dilakukan.

- d. Kegiatan Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno yang dikelola oleh UPTD Museum Signinjei Jambi dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.051.888.700,00 realisasinya sebesar Rp. 579.447.500,00 atau sebesar 55,09 %.

Penyebab tidak tercapainya realisasi dikarenakan untuk kegiatan Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno terdapat kesalahan kode rekening kegiatan yang seharusnya melalui mekanisme Tender tetapi dilaksanakan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan (TUP) sehingga disetor ke Kas Daerah.

- e. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikelola oleh Bidang Destinasi dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.712.262.693,00 realisasinya sebesar Rp. 2.802.781.264,00 atau sebesar 75,50 %

Penyebab tidak tercapainya realisasi dikarenakan untuk kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata yang merupakan kegiatan DAK Fisik Tahun 2019 terdapat permasalahan antara pengumuman pemenang Tender dan batas pencairan yang limit sehingga tidak dapat dilaksanakan (batal tender) dan terdapat beberapa pekerjaan di Kabupaten status lahan yang belum tuntas sehingga batal dilaksanakan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Penandatanganan dan pengesahan DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi diterbitkan pada Bulan Februari 2019 hal ini disebabkan oleh adanya Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non Fisik Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2019 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang kelengkapannya berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum dilengkapi dan menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian DPA-SKPD.
- b. Penyerapan anggaran baru dilaksanakan pada Bulan Februari dikarenakan DPA-SKPD baru disahkan sehingga pengambilan Uang Persediaan (UP), pengisian Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dilaksanakan pada Bulan Februari 2019 sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

- c. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- d. Kurang optimalnya koordinasi antar Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sehingga menghambat pencapaian realisasi program maupun kegiatan.
- e. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi menginduk pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Jambi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi adalah Basis Akrual dan berlaku juga untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aktiva, hutang dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aktiva, hutang dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan dimana pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.

4.4.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Koreksi atas penerimaan pendapatan (Pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurangan pendapatan.

4.4.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Belanja dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi/urusan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

4.4.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.4.4. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- a. ***Kas di Kas Daerah*** merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Jambi yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- b. ***Kas di Bendahara Penerimaan*** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

- c. **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

4.4.5. Piutang

Piutang merupakan hak yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang / tagihan ke pihak ketiga dinilai sebesar nilai nominal, tidak dibentuk cadangan penghapusan piutang yang tidak tertagih. Piutang / tagihan ke pihak ketiga yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dihapuskan sekaligus pada saat piutang / tagihan ke pihak ketiga dinyatakan tidak dapat ditagih, sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Entitas akuntansi yang melakukan pencatatan persediaan dengan tidak menggunakan metode ini harus mendapat persetujuan dari Bupati dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi / opname fisik persediaan. Persediaan dalam Neraca disajikan sebesar :

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

- d. Persediaan yang rusak nilainya ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan persediaan yang sudah tidak ada manfaatnya dinilai sebesar Rp1,00 sampai dengan diterbitkan SK penghapusannya.

4.4.7. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Investasi Permanen dibuku berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi dalam bentuk saham ditukar dengan aktiva lain, maka nilai saham yang ditukar/dijual ditetapkan harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata.

4.4.8. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang diatribusikan secara langsung adalah: Biaya persiapan tempat; Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat

(*handling cost*); Biaya pemasangan (*installation cost*); Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, dan Biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap pakai

Pengeluaran setelah perolehan awal (*Subsequent Expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dengan nilai minimal 2 persen dari nilai suatu asset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

4.4.9. Aktiva Lainnya

Aktiva Lainnya adalah Aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aktiva Lancar, Aktiva Tetap dan Investasi Permanen. Aktiva lainnya terdiri dari :

- 1) **Tagihan penjualan angsuran** adalah tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari perjanjian/kontrak. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan tagihan penjualan angsuran dilaporkan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain meliputi klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur, klasifikasi menurut jenis aktiva yang dijual;
- 2) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga** adalah menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan Perjanjian Kerjasama

atau Nota Kesepahaman. Nilai bangunan yang diperoleh dicatat berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. Pengungkapan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, setidaknya disajikan klasifikasi menurut jenisnya;

- 3) **Dana cadangan** adalah dana yang dibentuk guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dapat membentuk lebih dari satu dana cadangan. Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya. Hal yang harus diungkapkan meliputi klasifikasi berdasarkan tujuan pembentukannya;
- 4) **Lain-lain Aktiva** adalah aktiva yang tidak dapat dikategorikan dalam tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dan dana cadangan yang antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan keuangan daerah atau pihak ketiga lainnya. Lain-lain Aktiva dinilai sebesar nilai nominalnya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan keuangan disesuaikan kebutuhan daerah yang antara lain meliputi klasifikasi menurut nama pegawai yang bersangkutan (debiturnya).

4.4.10. Hutang

Hutang adalah kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Hutang antara lain :

- 1) Kewajiban yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dan daerah otonom lainnya, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri;
- 2) Kewajiban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Pengakuan hutang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Hutang PFK diakui pada saat SPM diterbitkan dan saat diterimanya PFK lainnya;
- 2) Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima atau pada saat kewajiban timbul;

- 3) Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi. Hutang dalam valuta asing dikonversikan dalam rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

4.4.11. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) **Ekuitas Dana Lancar** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam jangka pendek.

Penilaian:

8. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
9. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
10. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.

Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan

- 2) **Ekuitas Dana Diinvestasikan** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) **Ekuitas Dana Dicapang** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) **Ekuitas Dana Donasi** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau

sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Selama Tahun Anggaran 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menerima anggaran pengeluaran (Pagu) sebesar **Rp. 41.065.730.447,00** yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dan terealisasi (neto) sebesar **Rp. 36.344.768.078,00** atau **88,50 %** dari anggaran.

Realisasi Belanja Hibah sebesar **Rp. 39.000.000,00** merupakan penyerahan barang berupa Personal Komputer, Printer dan UPS dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi guna mendukung operasional perencanaan pada Sub Bagian Program

Target pendapatan yang dialokasikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam TA 2019 sebesar **Rp. 510.150.000,00** terealisasi sampai dengan TA 2019 sebesar **Rp.202.641.000,00** atau **39,72 %**

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2019 disajikan sebagai berikut

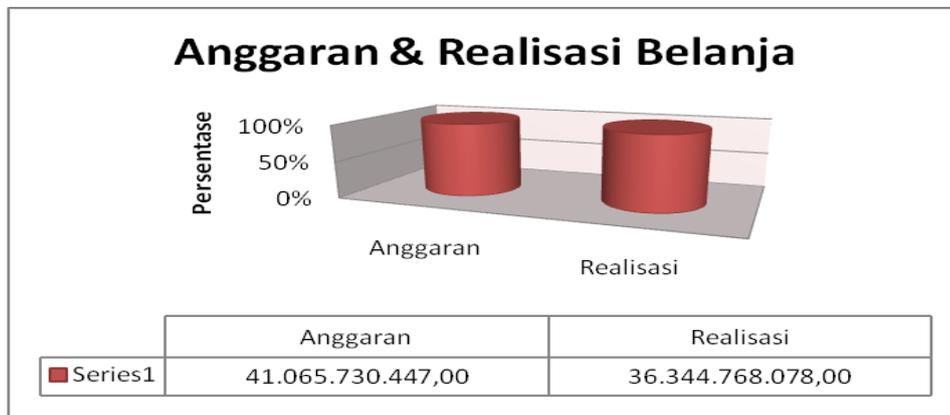
Tabel 4
Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL.
			ANGGARAN
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%
Pendapatan Retribusi Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%
Jumlah Pendapatan	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%
Belanja			
Belanja Operasi	37.046.950.047,00	33.114.519.914,00	89,39%
Belanja Pegawai	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48%
Belanja Barang dan Jasa	19.384.787.820,00	17.977.085.084,00	92,74%
Belanja Hibah	-	39.000.000,00	-
Belanja Modal	4.528.930.400,00	3.432.889.164,00	75,80%
Jumlah Belanja	41.575.880.447,00	36.547.409.078,00	87,91%

Grafik perbandingan anggaran dan realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2019 disajikan sebagai berikut :

Grafik 2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019



Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL.
			ANGGARAN
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%
Pendapatan Retribusi Daerah	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%
Jumlah Pendapatan	510.150.000,00	202.641.000,00	39,72%

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 202.641.000,00** tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Retribusi Daerah yang merupakan target pendapatan pada UPTD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi pada tahun anggaran ini dan dibukukan sebagai pendapatan daerah.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 berdasarkan perhitungan bruto sebesar **Rp.36.344.768.078,00** atau **88,50 %** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar **Rp.41.065.730.447,00** . Dibandingkan dengan realisasi belanja bruto Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.29.740.494.601,00** , terdapat kenaikan sebesar **Rp.6.604.273.477,00**

Realisasi Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 per sumber dana dan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-19			31-Des-18		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	37.046.950.047,00	33.114.519.914,00	89,39%	28.892.072.095,00	27.134.932.402,00	93,92%
Belanja Pegawai	17.662.162.227,00	15.098.434.830,00	85,48%	14.848.663.895,00	13.748.270.861,00	92,59%
Belanja Barang dan Jasa	19.384.787.820,00	17.977.085.084,00	92,74%	14.043.408.200,00	13.386.661.541,00	95,32%
Belanja Hibah	-	39.000.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal	4.528.930.400,00	3.432.889.164,00	75,80%	3.599.918.800,00	2.851.379.199,00	79,21%
Jumlah Belanja	41.575.880.447,00	36.547.409.078,00	87,91%	32.491.990.895,00	29.986.311.601,00	92,29%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.36.547.409.078,00** merupakan realisasi belanja netto yaitu realisasi belanja setelah dikurangi pengembalian belanja (SSP) atas belanja yang terjadi selama Tahun Anggaran 2019.

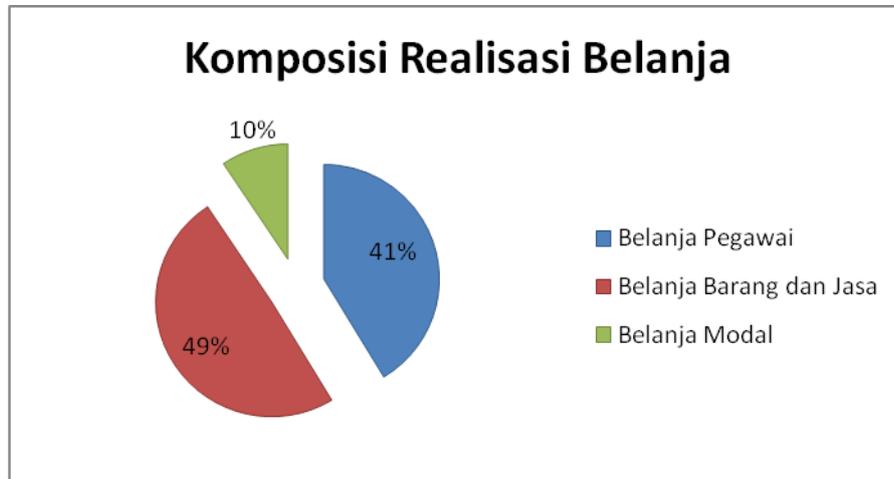
Tabel 7
Pengembalian Belanja (SSP) Tahun Anggaran 2019 per Jenis Belanja

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI BELANJA NETO
BELANJA OPERASI	33.404.459.276,00	289.939.362,00	33.075.519.914,00
Belanja Pegawai	15.098.434.830,00	0,00	15.098.434.830,00
Belanja Barang	17.977.085.084,00	0,00	17.977.085.084,00
Belanja Hibah	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00
Belanja Modal	3.432.889.164,00	0,00	3.432.889.164,00
Jumlah Belanja	36.547.409.078,00	289.939.362,00	36.547.409.078,00

Komposisi realisasi belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik dibawah ini:

Gafik 3
Komposisi Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019



5.1.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.28.083.983.412,78** yang terdiri dari :

- a. Aset Lancar : **Rp. 8.389.550,00**
- b. Aset Tetap : **Rp.20.747.655.188,21**
- c. Aset Lainnya : **Rp. 7.327.938.674,57**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.42.522.713,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.28.041.460.699,78**

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

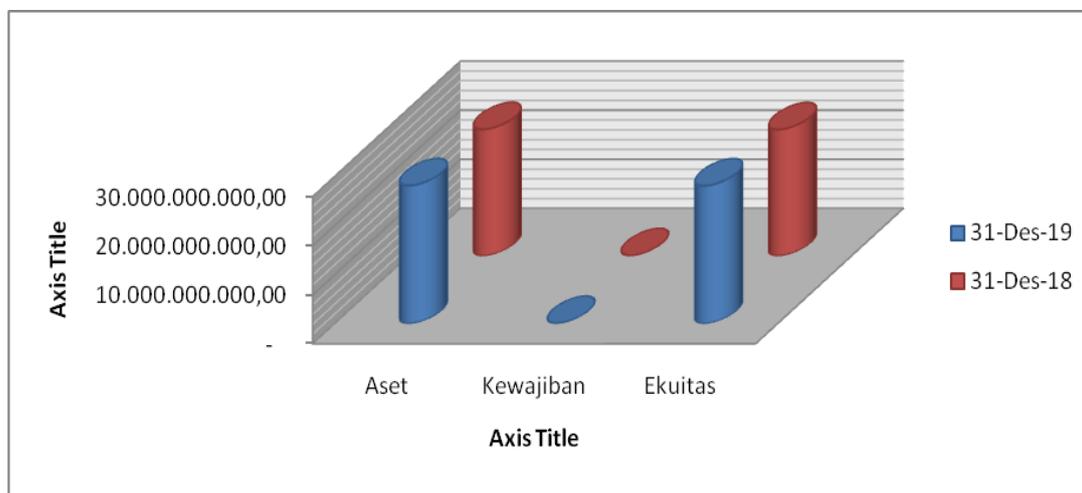
Tabel 8
Perbandingan Neraca 31 Des 2019 dan 31 Des 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31-Des-19	31-Des-18	KENAIKAN/PENURUNAN
ASET			
Aset Lancar	8.389.550,00	4.533.000,00	3.856.550,00
Aset Tetap	20.747.655.188,21	18.406.342.113,81	2.341.313.074,40
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	28.083.983.412,78	25.738.813.788,38	2.345.169.624,40
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	42.522.713,00	45.288.711,00	(2.765.998,00)
Jumlah Kewajiban	42.522.713,00	45.288.711,00	(2.765.998,00)
EKUITAS			
Ekuitas	28.041.460.699,78	25.693.525.077,38	2.347.935.622,40
Jumlah Ekuitas	28.041.460.699,78	25.693.525.077,38	2.347.935.622,40
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	28.083.983.412,78	25.738.813.788,38	4.690.339.248,80

Komposisi Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4
Grafik Komposisi Neraca



5.1.3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Ringkasan Laporan Operasional (LO)) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Laporan Operasional (LO) 31 Des 2019 dan 31 Des 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN – LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	-17,56%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	-17,56%
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	202.641.000,00	245.817.000,00	(43.176.000,00)	-17,56%
Lain -lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-	-
BEBAN	34.220.576.225,60	28.833.895.919,89	5.386.680.305,71	18,68%
BEBAN OPERASI	34.220.576.225,60	28.833.895.919,89	5.386.680.305,71	18,68%
Beban Pegawai – LO	15.098.434.830,00	13.748.270.861,00	1.350.163.969,00	9,82%
Beban Barang dan Jasa	17.970.462.536,00	13.392.086.787,00	4.578.375.749,00	34,19%
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.112.678.859,60	1.693.538.271,89	(580.859.412,29)	-34,30%
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(34.017.935.225,60)	(28.588.078.919,89)	(5.429.856.305,71)	18,99%

5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 10
Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 31 Des 2019 dan 31 Des 2018

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	25.693.525.077,38	0,00
SURPLUS/ DEFISIT-LO	-34.017.935.225,60	-28.588.078.919,89
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	21.102.770,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	36.344.768.078,00	0,00
EKUITAS AKHIR	28.041.460.699,78	-28.588.078.919,89

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

5.2.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.0,00** . Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Bila dibandingkan dengan saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.0,00** .

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.0,00** . Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai,

dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal setoran dari penerimaan retribusi jasa usaha daerah berupa penyewaan gedung dan tiket masuk pada museum di UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi .

Tabel 11
Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran didukung Berita Acara Pemeriksaan Kas serta bukti Rekening Koran per 31 Desember 2019 (terlampir).

Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.8.389.550,00** merupakan barang habis pakai untuk operasional kantor termasuk kegiatan berdasarkan penghitungan fisik dan Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, pada saat pemeriksaan BPK belum diserahkan ke masyarakat. Dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.4.533.000,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.3.856.550,00** atau **85,08 %** dari tahun yang lalu.

Tabel 12
Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Persediaan	8.389.550,00	4.533.000,00	3.856.550,00	85,08%
Jumlah Aset Lancar	8.389.550,00	4.533.000,00	3.856.550,00	85,08%

Daftar persediaan dan Berita Acara Opname persediaan terlampir.

5.2.2. Aset Tetap

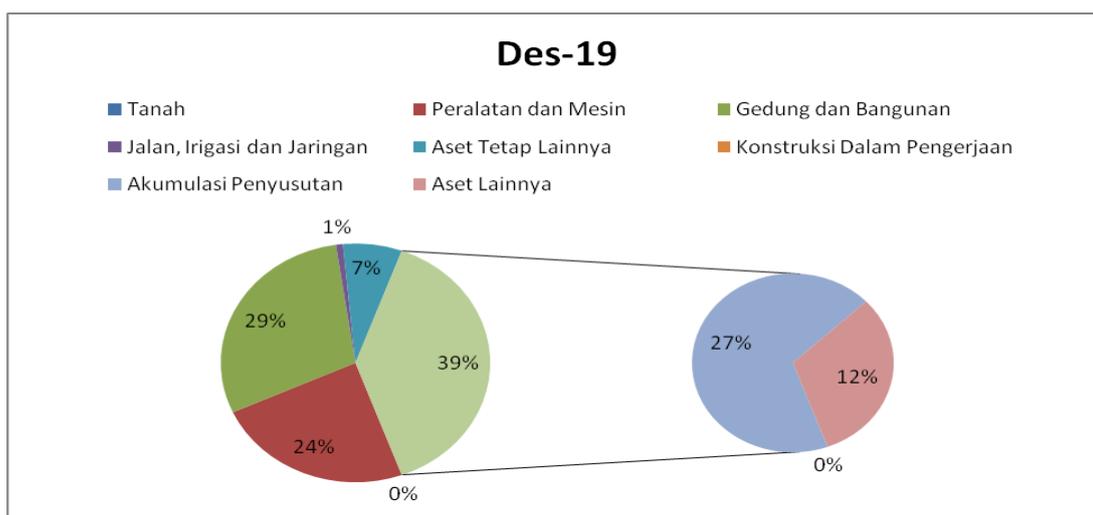
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.20.747.655.188,21** merupakan saldo aset tetap milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dibandingkan dengan periode sebelumnya yang merupakan saldo awal per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.18.406.342.113,81** terdapat kenaikan sebesar **Rp.2.341.313.074,40** atau **12,72 %** dari Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 13
Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	14.282.751.607,43	13.988.655.837,43	294.095.770,00	2,10
Gedung dan Bangunan	17.661.860.389,00	14.158.323.725,00	3.503.536.664,00	24,75
Jalan, Irigasi dan Jaringan	504.509.368,00	504.509.368,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.584.725.028,00	(343.640.500,00)	(7,50)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(15.942.550.704,22)	(14.829.871.844,62)	(1.112.678.859,60)	7,50
Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	20.747.655.188,21	18.406.342.113,81	2.341.313.074,40	12,72

Grafik 5
Komposisi Aset Tetap per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018



Tabel 14
Perbandingan Aset pada Neraca dan Aset Tetap Dlm Buku Inventarisasi Aset
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ASET DALAM NERACA	ASET DALAM SIMAK-BMN	SELISIH
Aset Lancar	8.389.550,00	8.389.550,00	-
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	14.282.751.607,43	14.282.751.607,43	-
Gedung dan Bangunan	17.661.860.389,00	17.661.860.389,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	504.509.368,00	504.509.368,00	-
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.241.084.528,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(15.942.550.704,22)	(15.942.550.704,22)	-
Aset Lainnya	7.327.938.674,57	7.327.938.674,57	-
Jumlah Aset	28.083.983.412,78	28.083.983.412,78	-

Kondisi Barang Milik Daerah

Saldo Aset sebesar **Rp.28.083.983.412,78** diklasifikasikan sebagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan kondisi BMD sebagai berikut :

- 1) Kondisi Baik (B) : **Rp. 28.083.983.412,78**
- 2) Kondisi Rusak Ringan (RR) : **Rp. 0,00**
- 3) Kondisi Rusak Berat (RB) : **Rp. 0,00**

Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.14.282.751.607,43** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.13.988.655.837,43** terdapat kenaikan sebesar **Rp.294.095.770,00** atau **2,10 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 15
Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Peralatan dan Mesin	14.282.751.607,43	13.988.655.837,43	294.095.770,00	2,10%
Jumlah	14.282.751.607,43	13.988.655.837,43	294.095.770,00	2,10%

Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.17.661.860.389,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.14.158.323.725,00** tidak terdapat kenaikan sebesar **Rp.3.503.536.664,00** atau **24,75 %** sama dengan Tahun yang lalu, dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 16
Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Gedung dan Bangunan	17.661.860.389,00	14.158.323.725,00	3.503.536.664,00	24,75%
Jumlah	17.661.860.389,00	14.158.323.725,00	3.503.536.664,00	24,75%

Jalan, Jaringan dan Instalasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Instalasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.504.509.368,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.504.509.368,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp.0,00** atau **0,00 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 17
Jalan, Jaringan dan Instalasi

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	504.509.368,00	504.509.368,00	0,00	0,00%
Jumlah	504.509.368,00	504.509.368,00	0,00	0,00%

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.4.241.084.528,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar

Rp.4.584.725.028,00 terdapat penurunan sebesar **Rp.343.640.500,00** atau **7,50 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 18
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Aset Tetap Lainnya	4.241.084.528,00	4.584.725.028,00	-343.640.500,00	-7,50%
Jumlah	4.241.084.528,00	4.584.725.028,00	-343.640.500,00	-7,50%

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,00** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 212.732.000,00** tidak terdapat penurunan dari Tahun Yang lalu.,dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 19
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.(15.942.550.704,22)** . Dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.(14.829.871.844,62)** terdapat penurunan sebesar **Rp.(1.112.678.859,60)** atau **7,50 %** dengan rincian seperti dalam tabel berikut :

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2018	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
Akumulasi Penyusutan	-15.942.550.704,22	-14.829.871.844,62	-1.112.678.859,60	7,50%
Jumlah	-15.942.550.704,22	-14.829.871.844,62	-1.112.678.859,60	7,50%

Kewajiban dan Ekuitas Dana

Saldo Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 28.083.983.412,78** merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek, yang terdiri atas :

- SILPA : Rp. 0,00
- Cadangan Piutang : Rp. 0,00
- Cadangan untuk Persediaan : Rp. 8.389.550,00
- Dana yg hrs disediakan : Rp. (42.522.713,00)

Untuk pembayaran utang

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok: “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung dan menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu (1) Museum Siginjei, (2) Museum Perjuangan Rakyat Jambi, dan (3) Taman Budaya Jambi.

Berikut tugas dan fungsi dari pemangku jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi seperti yang diatur dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut :

i. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Tugas:

- a. Membantu Gubernur dibidang tugasnya
- b. Memimpin segala kegiatan dinas

- c. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur baik baik diminta atau tidak sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil
- d. Melaksanakan perintah dan atau Instruksi Gubernur
- e. Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lain untuk kelancaran tugas dinas
- f. Melaporkan segala kegiatan kepada Gubernur
- g. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)

ii. Sekretariat

Tugas:

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, menganalisa dan mengarahkan dalam melakukan urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program

Fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan
- b. Melakukan urusan rumah tangga, protokol dan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan penyusunan program

iii. Bidang Pengembangan Nilai Budaya dan Seni

Tugas :

Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menyelenggarakan pengembangan di bidang nilai budaya dan seni.

Fungsi:

- a. Menyiapkan analisa rencana pengembangan dan penyelenggaraan nilai budaya dan seni
- b. Menyiapkan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang nilai budaya dan seni
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang nilai budaya dan seni

iv. Bidang Sejarah dan Purbakala

Tugas:

Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas mengelola kebudayaan khususnya bidang sejarah, purbakala, dan permuseuman yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang sejarah dan purbakala berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Penyiapan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan rencana operasional di bidang sejarah dan purbakala.
- c. Penyiapan bahan pembinaan di bidang sejarah dan purbakala.
- d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan penelitian di bidang sejarah dan purbakala.
- e. Pembuatan laporan kegiatan di bidang sdan purbakala sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
- f. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

v. Bidang Pengembangan Destinasi

Tugas:

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis, memfasilitasi, mengkoordinasi, memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan serta pengembangan sumber daya wisata, alam dan budaya.

Fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengorganisasian seluruh kegiatan pada bidang pengembangan destinasi pariwisata
- b. Pembuatan rencana dan program kerja tahunan bidang pengembangan destinasi pariwisata
- c. Penghimpunan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- d. Penganalisisan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- f. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- h. Perumusan dan penyiapan juklak dan juknis penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- i. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Perencanaan pengembangan perusahaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata
- l. Penyiapan bahan informasi dan perkembangan investasi di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota
- m. Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pariwisata, pemberdayaan serta objek dan daya tarik wisata kabupaten/ kota

- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan usaha di bidang pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- o. Penyampaian informasi, pertimbangan dan saran dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
- p. Pembinaan dan pemberian petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
- q. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan destinasi pariwisata
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

vi. Bidang Pemasaran

Tugas:

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan promosi pariwisata, pengembangan pasar dan kerjasama dan hubungan antar lembaga pariwisata

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/kota dan *stakeholder* dan lembaga-lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar;
- b. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran;
- c. Penyiapan bahan promosi berbasis media/teknologi informasi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan promosi, publikasi, pelayanan informasi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif di bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri;
- e. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

vii. UPTD Museum Siginjei Jambi

Museum Siginjei Jambi adalah museum umum mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penetbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal dan regional (Provinsi).

Fungsi:

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pengenalan dan menyebarluaskan hasil penelitian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Melakukan perawatan/pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi museum dan permuseuman
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha

viii. UPTD Museum Perjuangan Rakyat Jambi

Tugas:

Museum Perjuangan Rakyat adalah museum khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan/pelestarian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, penyajian serta publikasi, bimbingan edukatif kultural benda sejarah perjuangan rakyat Jambi sebelum kemerdekaan RI, Kemerdekaan RI dan masa pengisian kemerdekaan RI, yang bersifat lokal dan regional (provinsi)

Fungsi :

- a. Pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi

- b. Pengenalan dan menyebarluaskan hasil penelitian benda-benda yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi
- c. Pembimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda kolektif yang mempunyai nilai sejarah dan kejuangan rakyat Jambi
- d. Pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah
- e. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

ix. UPTD Taman Budaya Jambi

Tugas:

Taman Budaya Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kebudayaan dan pariwisata dalam bidang kegiatan pembinaan dan pengembangan seni budaya lokal dan regional di Provinsi Jambi.

Fungsi :

- a. Pelaksana kegiatan laboratoris berupa pengkajian, revitalisasi pengolahan dan eksperimentasi
- b. Pelatihan dan bimbingan
- c. Pelaksana pameran dan pertunjukan seni budaya
- d. Pelaksana festival, lomba dan sayembara seni budaya
- e. Pelaksana ceramah, temu karya, sarasehan, lokakarya, workshop, diskusi seminar dan temu karya.
- f. Pelaksanaan dokumentasi, perpustakaan budaya, informasi seni, promosi dan sosialisasi.
- g. Pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Taman Budaya.

STRUKTUR ORGANISASI

B. SUMBER DAYA SKPD

Dilihat dari sudut pandang makro, Provinsi Jambi mempunyai aset kepariwisataan berupa keragaman budaya dan kekayaan alam, industri perhotelan dan restoran/rumah makan, dan industri pariwisata lainnya. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik dan fokus terhadap pelaksanaan teknis dinas, sumber daya yang dimiliki dapat diidentifikasi pada tabel berikut ini

Tabel 21
Sumber Daya Disbudpar Provinsi Jambi

No	Sumber Daya	Jenis Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Sumber Daya Aparatur	a. Disbudpar b. Museum Siginjei c. MPRJ d. TBJ e. Gentala Arasy	orang	98 38 18 24 20	
2	Fisik dan bangunan	a. Kantor Dinas b. Gedung Museum Siginjei c. Gedung MPRJ d. Gedung TBJ e. Gedung Olah Seni	gedung	1 4 2 5 1	1.800.000 m ² 3.837.000 m ² 1.365.000 m ²
3	Peralatan dan mesin	Genset	unit	3	
4.	Alat transportasi	a. Kendaraan R-4 b. Kendaraan R-2 c. Kendaraan R-3 d. Perahu karet	unit	11 32 1 5	
5	Alat studio dan komunikasi	Peralatan Sound system	item	77	
6	Benda bercorak kebudayaan dan sejarah	a. Koleksi Museum Siginjei b. Koleksi MPRJ c. Gentala Arasy	koleksi	3.379 467 54	

Tabel 22
Jumlah PNS Di lingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jambi berdasarkan Pangkat dan Jenis
Kelamin s.d Tahun 2020

Berdasarkan Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Pembina Utama Muda/ IV.c	2	2	-
Pembina Tk 1/ IV.b	5	3	2
Pembina/ IV.a	11	6	5
Penata Tk. 1/ III.d	28	12	16
Penata/ III.c	26	8	18
Penata Muda Tk 1/ III.b	25	15	10
Penata Muda/ III.a	13	9	4
Pengatur Tk 1/ II.d	6	6	-
Pengatur/ II.c	5	2	3
Pengatur Muda Tk 1/ II.b	3	3	-
Pengatur Muda/ II.a	1	-	1
Juru Muda/ I.a	1	-	1
Jumlah	126	66	60

Tabel 23
Jumlah PNS Dilingkungan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Pendidikan

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	
S3	1
S2	7
S1	72
DIII/D IV	11
SMU	34
SMP	1
Jumlah	126

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Dengan mengambil tolok ukur capaian kinerja Disbudpar Provinsi Jambi sampai dengan akhir tahun 2019, maka capaian kinerja yang dapat terukur adalah: (1) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara; (2) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (3) Jumlah kunjungan museum; (4) Jumlah pertumbuhan usaha pariwisata; (5) Jumlah koleksi museum; dan (6) Jumlah kelompok seni/sanggar, dapat diilustrasikan pada tabel-tabel berikut ini.

C.1 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan urusan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatanyaitu:

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a. Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
 - b. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
2. Program Pengembangan Kemitraan
 - a. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
 - b. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database.
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.
3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Dalam).
 - c. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
 - d. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata.

C.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

C.2.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah meningkatnya apresiasi nasional dan internasional terhadap kepariwisataan daerah. Anggaran yang disediakan adalah Rp. 4.024.112.693,-

Pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Rp. 311.850.000,- Realisasi Rp. 304.119.050, (97.52%),
2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Rp. 3.712.262.693, Realisasi Rp.2.802.781.264, (75.50%)

a. Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

- Telah dilaksanakan kegiatan pembuatan profil daya tarik wisata berbasis audio visual Kabupaten Merangin dalam bentuk video dan digandakan dalam bentuk DVD.
- Telah teridentifikasi objek wisata baru sebanyak 6 objek sebagai berikut:

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Potensi
1	Bukit Tempurung	Desa Lubuk Bangkar Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun	<i>Panoramic view, camping, hiking, bird watching, coffee tour, outbound activities</i>
2	Hutan Mangrove Pangkal Babu	Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<i>Mangrove tour, river tour, bird watching, fishing, panoramic view</i>
3	Taman Tanggo Rajo	Kelurahan Muaro Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo	<i>Outbound activities, selfie spots, picnic ground</i>
4	Air Hitam Dalam	Desa Simpang Bungur, Kecamatan Air Hitam Dalam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<i>Wild animal watching, wild orchid, river tour, fishing, camping, tracking, hiking</i>
5	Goa Bujang dan Singering	Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin	<i>Caving, tracking, hiking, bird watching</i>
6	Sungai Mengkarang Purba	Desa Bedeng Rejo, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin	<i>Tubing, swimming, camping, tracking</i>

b. *Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran sejumlah Rp. 3.712.262.693,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.802.781.264,- dan realisasi fisik sebesar 75,50%. Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 909.481.429,-.

Pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan *big letter* (huruf timbul) pada Daya Tarik Wisata Danau Pauh Merangin
2. Pengadaan sarana atraksi wisata air di Danau Pauh, Merangin
4. Pembangunan *big letter* di kawasan Kayu Aro
5. Penataan *camping ground* di kawasan Aroma Peco
6. Penataan Taman Bukit Khayangan
7. Pembangunan kamar ganti/toilet umum di kawasan Tanggo Rajo, Ancol Jambi
8. Pembangunan pentas seni di Gentala Arasy
9. Pengadaan dan pemasangan lampu Taman Danau Sipin,
10. Pembangunan plaza pusat jajanan/kuliner di arena ex. MTQ.

Permasalahan dan Solusi

- Pembangunan *boardwalk* Danau Sipin telah dilakukan penayangan lelang dan telah diikuti oleh 29 Perusahaan Peminat. namun setelah dievaluasi oleh Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemprov. Jambi, semua perusahaan yang mengikuti proses tender belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenangnya. selanjutnya UKPBJ Pemprov. Jambi melakukan pembukaan penawaran tahap dua dan

memberikan kesempatan pada perusahaan yang telah mendaftar pada tahap pertama untuk melengkapi dokumen agar memenuhi syarat sesuai ketentuan juknis dan diikuti oleh beberapa perusahaan sehingga pihak UKPBJ menetapkan pemenang.

- Kegiatan penataan camping ground Danau Gunung Tujuh juga tidak bisa dilaksanakan karena belum adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia karena lahan tersebut berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- Kegiatan ini dilakukan Revisi APBD dan baru diterima pada bulan Mei sehingga untuk proses pelaksanaan lelang mengalami keterlambatan. Sedangkan sesuai petunjuk teknis pencairan anggaran adalah 21 Juli 2019 Penetapan pemenang telah melampaui batas akhir penandatanganan kontrak sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Fisik TA.2019, berkenaan dengan hal tersebut maka pemenang lelang tidak dapat dilanjutkan pada proses kontrak karena dana untuk kegiatan tersebut sudah tidak tersedia lagi.

C.2.3. Program Pengembangan Kemitraan

Sasaran program ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata. Anggaran yang digunakan adalah Rp. 847.470.750,-.

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

1. Pengembangan dan Penguatan DataBase dengan pagu Rp. 227.407.975, Realisasi Rp. 222.045.975, (97,64%)
2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan pagu anggaran Rp.240.763.400,-. Realisasi Rp.236.675.700,- (98,30%)

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan pagu anggaran Rp. 379.299.375, Realisasi Rp. 379.299.375, (100%)

a. *Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.*

Telah dilaksanakan pembinaan desa wisata di 3 kabupaten:

1. Desa Pendung Talang Genting (Pentagen) Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci pada tanggal 11 April 2019 diikuti 35 peserta.
2. Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin pada tanggal 6 Agustus 2019 diikuti 35 peserta.
3. Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin diikuti 35 peserta.

Peserta adalah perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pelaku pariwisata di desa wisata dan dinas yang membidangi pariwisata setempat.

Sampai tahun 2019 telah diresmikan sebanyak 6 (enam) desa wisata sebagai berikut:

NO	NAMA DESA WISATA	LOKASI	NOMOR SK	POTENSI/ KEUNGGULAN
1	LEKOK 50 TUMBI LEMPUR	DESA LEMPUR, KABUPATEN KERINCI	SK BUPATI NOMOR 556/ Kep. 317/2018, DIRESMIKAN TANGGAL 20 AGUSTUS 2016	EKOWISATA
2	MUARA JAMBI	DESA MUARO JAMBI, KABUPATEN MUARO JAMBI	SK KADES MUARA JAMBI NOMOR 751 TAHUN 2016, DIRESMIKAN TANGGAL 11 MEI 2017	CANDI MUARAJAMBI
3	MENKARANG PURBA	DESA BEDENG REJO, KABUPATEN MERANGIN	SK KEPALA DINAS PARPORA KAB. MERANGIN NOMOR 133 TAHUN 2018, DIRESMIKAN TANGGAL 22 DESEMBER 2018	FOSIL SUNGAI MENKARANG PURBA
4	JERNIH JAYA	DESA JERNIH JAYA, KABUPATEN KERINCI	SK BUPATI NOMOR 556/ Kep. 317/2018, DIRESMIKAN TANGGAL 22 DESEMBER 2018	RAWA BENTO
5	BATU TUO AIR BATU	DESA AIR BATU, KABUPATEN MERANGIN	SK KEPALA DINAS PARPORA KAB. MERANGIN NOMOR 133 TAHUN 2018, DIRESMIKAN TANGGAL 22 SEPTEMBER 2019	GEO PARK MERANGIN
6	PENTAGEN	DESA PENDUNG TALANG GENTING (PENTAGEN), KABUPATEN KERINCI	SK BUPATI NOMOR 556/ Kep. 317/2018 DIRESMIKAN TANGGAL 21 SEPTEMBER 2019	TAMAN WISATA PERTIWI

Sampai Tahun 2019 Disbudpar Provinsi Jambi telah membina 6 (enam) Kelompok Sadar Wisata sebagai berikut:

NO	NAMA POKDARWIS	LOKASI	KETUA POKDARWIS	KETERANGAN
1	PENCAGURA	DESA LEMPUR	ZAID	KABUPATEN KERINCI
2	LAGILAGALA	DESA MUARO JAMBI	ABDUL HAVIZ	KABUPATEN MUARO JAMBI
3	MENGKARANG PURBA	DESA BEDENG REJO	ASRIJAL	KABUPATEN MERANGIN
4	DESA JERNIH JAYA	DESA JERNIH JAYA	LEO WALDI	KABUPATEN KERINCI
5	BATU TUO	DESA AIR BATU	ARIS	KABUPATEN MERANGIN
6	PERTIWI PENTAGEN	DESA PENDUNG TALANG GENTING (PENTAGEN)	RUDI HARTONO	KABUPATEN KERINCI

b. Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database.

Telah dilaksanakan penyusunan Data Base Kepariwisata Provinsi Jambi Tahun 2019 pemuktahiran data usaha pariwisata meliputi usaha akomodasi, usaha perjalanan, transportasi, restoran dan rumah makan, usaha hiburan dan rekreasi, dan usaha profesi pariwisata serta pemuktahiran data kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Data base ini telah digandakan dalam bentuk buku dan cakra padat (CD), Berikut deskripsi data kunjungan wisatawan

Tabel 24

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Provinsi Jambi berdasarkan Daerah Tujuan Dalam Provinsi Jambi

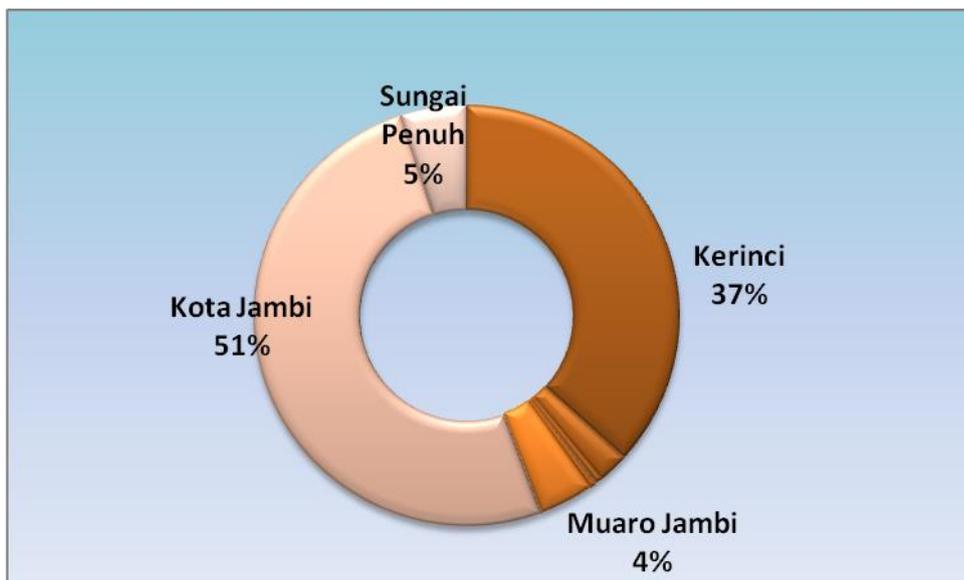
No.	Wisatawan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
A	B	C	D	E	F	G
1	Kerinci	4.310	6.477	1.386	5.325	3.859
2	Merangin	-	-	-	-	238
3	Sarolangun	108	157	108	135	64
4	BatangHari	38	54	54	65	49
5	MuaroJambi	230	378	545	713	424
6	Tanjabtjm	54	42	16	19	5
7	Tanjabbar	22	36	54	53	25
8	Bungo	54	36	16	22	8
9	Tebo	40	24	27	13	1
10	Kota Jambi	5.888	4.834	3.160	4.523	5.328
11	Sungai Penuh	32	30	13	19	525
Total Provinsi		10.776	12.069	5.378	10.887	10.526
Pertumbuhan		6,49%	12,00%	-55,44%	102,44%	-3,32%

Pada periode Tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 6,49% dimana pada Tahun 2014 sebanyak 10.119 orang menjadi 10.776 orang pada Tahun 2015. Pada periode Tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 12,00% dimana pada tahun 2015 sebanyak 10.776 orang menjadi 12.069 orang pada Tahun 2016. Pada periode Tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 55,44% dimana pada Tahun 2016 sebanyak 12.069 orang menjadi 5.378 orang pada Tahun 2017. Pada periode Tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebesar 102,44% dimana pada Tahun 2017 sebanyak 5.378 orang menjadi 10.887 orang pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 3,32 %.

Grafik 6
Grafik Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara ke Provinsi Jambi



Grafik 7
Grafik daerah-daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman) periode tahun 2019.



Peringkat 3 besar daerah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan manca Negara adalah sebagai berikut. Kota Jambi merupakan daerah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara selama Tahun 2019 yaitu sebesar 51% dari total kunjungan wisman ke Provinsi Jambi atau sebanyak 5.328 orang kemudian disusul oleh Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 37% atau sebanyak 3.859 orang dan Kota Sungai Penuh sebesar 5% atau sebanyak 525 orang

Tabel 25

Tabel jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke Provinsi Jambi berdasarkan daerah tujuan dalam Provinsi Jambi

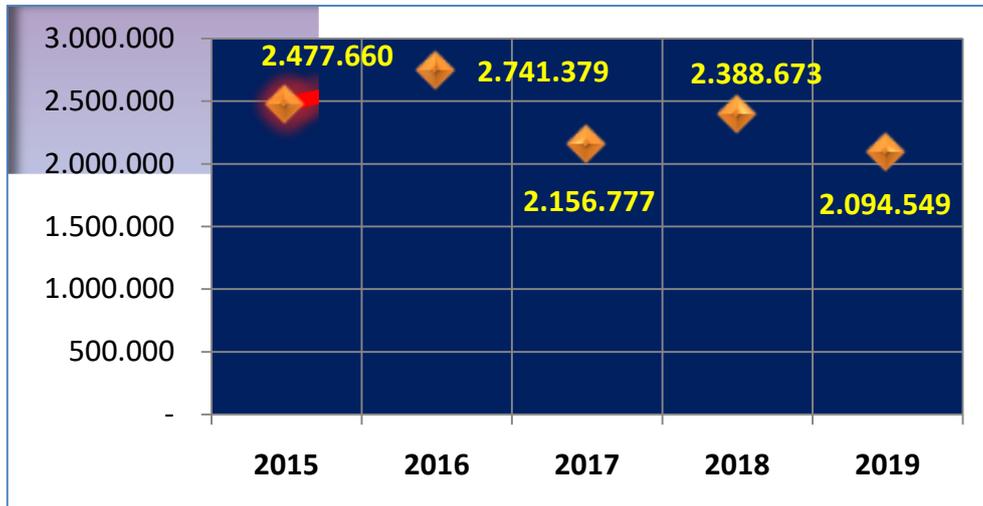
No.	Tujuan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019(Orang)
A	B	f	g	h	i	
1	Kerinci	329.175	328.965	266.554	359.667	387.584
2	Merangin	520.309	520.862	431.355	465.000	448.933
3	Sarolangun	33.077	32.897	21.568	34.389	43.130
4	BatangHari	19.821	35.638	17.254	37.106	40.799
5	MuaroJambi	297.319	274.138	258.813	265.300	104.827
6	Tanjabtjm	9.911	16.448	8.627	9.012	9.525
7	Tanjabbar	37.165	54.828	45.782	58.571	14.760
8	Bungo	103.548	109.655	97.055	91.045	91.045
9	Tebo	247.766	219.310	258.813	125.750	106.049
10	KotaJambi	693.745	1.011.569	653.900	867.500	886.971
11	SungaiPenuh	185.825	137.069	97.055	75.333	40.799
Total		2.477.660	2.741.379	2.156.777	2.388.673	2.094.549
Pertumbuhan		8,00%	10,64%	-21,33%	10,75%	-12,31%

Pada periode Tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 8,00% dimana pada Tahun 2014 sebanyak 2.294.130 orang menjadi 2.477.660 orang pada Tahun 2015. Pada periode Tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 10,64% dimana pada Tahun 2015 sebanyak 2.477.660 orang menjadi 2.741.379 orang pada Tahun 2016. Pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 21,33% dimana pada tahun 2016 sebanyak 2.741.379 orang menjadi 2.156.777 orang pada tahun 2017.

Periode 2017-2018 terjadi peningkatan 10,75% dimana pada tahun 2017 sebanyak 2.156.777 orang menjadi 2.388.673 orang pada 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 12,31%.

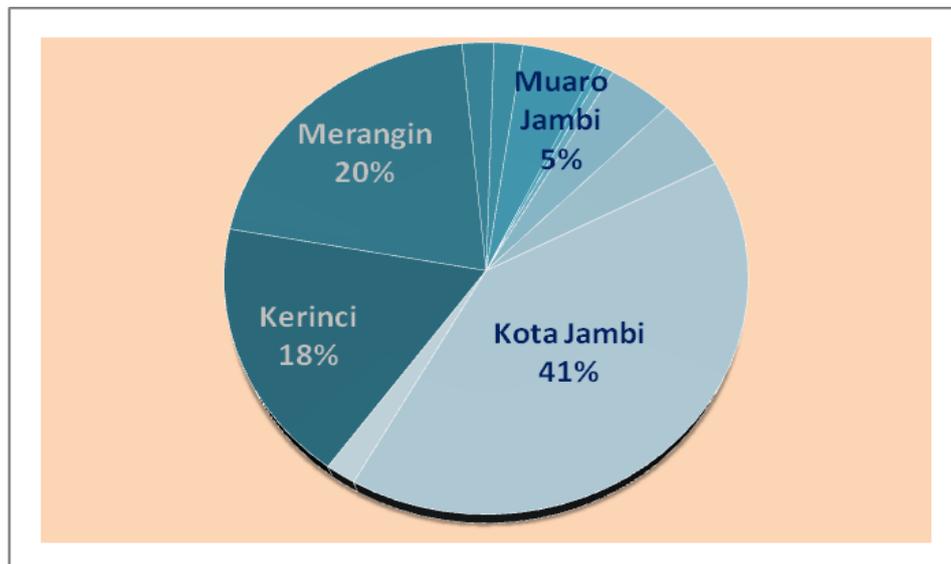
Grafik 8

Grafik perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Provinsi Jambi.



Grafik 9

Grafik daerah-daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan nusantara



Kota Jambi merupakan daerah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara selama Tahun 2019 yaitu sebesar 41% dari total kunjungan wisnus ke Provinsi Jambi atau sebanyak 886.971 orang kemudian disusul oleh Kabupaten Merangin yaitu sebesar 20% atau sebanyak 448.933 orang kemudian Kabupaten Kerinci sebesar 18% atau sebanyak 387.584 orang.

Tabel 26

Tabel jumlah kunjungan wisatawan (gabungan)

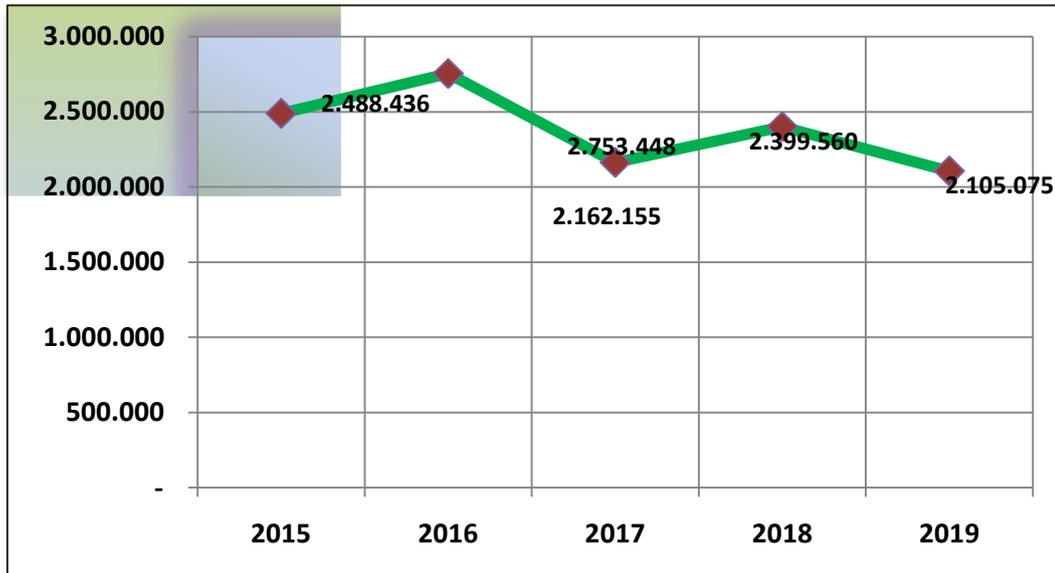
No.	Tujuan	2015 (Orang)	2016 (Orang)	2017 (Orang)	2018 (Orang)	2019 (Orang)
A	B	C	D	e	f	G
1	Kerinci	333,486	335,442	267,940	364,992	391.443
2	Merangin	520,309	520,862	431,355	465,000	449.171
3	Sarolangun	33,185	33,053	21,675	34,524	43.194
4	BatangHari	19,859	35,692	17,308	37,171	40.739
5	MuaroJambi	297,549	274,516	259,358	266,013	105.251
6	Tanjabtlim	9,965	16,491	8,643	9,031	9.530
7	Tanjabbar	37,186	54,864	45,836	58,624	14.785
8	Bungo	103,601	109,691	97,071	91,067	11.289
9	Tebo	247,806	219,334	258,840	125,763	106.050
10	KotaJambi	699,633	1,016,403	657,060	872,023	892.299
11	SungaiPenuh	185,857	137,099	97,068	75,352	41.324
Total		2,488,436	2,753,448	2,162,155	2,399,560	2.105.075
Pertumbuhan		7.99%	10.65%	-21.47%	10.98%	-12,3 %

Pada periode Tahun 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 7,99% dimana pada Tahun 2014 sebanyak 2.304.249 orang menjadi 2.488.436 orang pada Tahun 2015. Pada periode Tahun 2015-2016 terjadi peningkatan sebesar 10,65% dimana pada Tahun 2015 sebanyak 2.488.436 orang menjadi 2.753.448 orang pada Tahun 2016. Pada periode tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 21,47 % dimana pada Tahun 2016 sebanyak 2.753.448 orang menjadi 2.162.155 orang pada Tahun 2017. Pada periode Tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebesar 10,98% dimana pada Tahun 2017 sebanyak 2.162.155 orang menjadi 2.399.560

orang pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 penurunan jumlah wisatawan adalah sebesar 12,3 %.

Grafik 10

Grafik perkembangan jumlah kunjungan wisatawan (gabungan)



Penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 disebabkan oleh:

- Belum adanya konektifitas penerbangan internasional dari luar negeri ke provinsi Jambi dan kedatangan wisman masih bersifat indirect dari provinsi lain seperti Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kepri dan Sumatera Selatan.
- Dampak bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi selama 90 hari dan adanya *travel warning/travel advice* ke Indonesia dari beberapa Negara yang merupakan asal wisatawan potensial ke Jambi seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Italia dan Australia.
- Tahun 2019 adalah tahun politik yang membatasi motif perjalanan wisatawan.
- Harga tiket angkutan udara yang naik secara signifikan sehingga terjadi penurunan angka kedatangan penumpang di bandara Sultan Thaha.

Dari data base kepariwisataan berikut adalah table objek wisata di Provinsi Jambi

Tabel 27
Tabel Objek Daya Tarik Wisata Provinsi Jambi per Kategori Tahun 2019

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah DTW	Alam	Buatan	Sejarah/ Budaya	% Alam	% Buatan	% Sejarah/ Budaya
1	Kerinci	138	95	28	15	68,84	20,29	10,87
2	Merangin	45	33	10	2	73,33	22,22	4,44
3	Sarolangun	36	19	12	5	52,78	33,33	13,89
4	Batanghari	23	8	8	7	34,78	34,78	30,43
5	Muaro Jambi	17	3	12	2	17,65	70,59	11,76
6	Tanjung Jabung Timur	16	8	3	5	50,00	18,75	31,25
7	Tanjung Jabung Barat	28	10	16	2	35,71	57,14	7,14
8	Tebo	18	9	3	6	50,00	16,67	33,33
9	Bungo	36	20	11	5	55,56	30,56	13,89
10	Kota Jambi	151	3	94	54	1,99	62,25	35,76
11	Kota Sungai Penuh	25	7	8	10	28,00	32,00	40,00
TOTAL		533	215	205	113	40,34	38,46	21,20

Wisata Buatan : 205 DTW (38,46% dari total DTW)

Wisata Sejarah/Budaya : 113 DTW (20,81% dari total DTW)

PERTUMBUHAN DAYA TARIK WISATA

A. Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DTW) di Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2019

No.	Kabupaten / Kota	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	64	67	97	97	99	126	128	130	130	138
2	Merangin	36	28	27	13	15	35	35	35	35	45
3	Sarolangun	25	28	26	9	10	7	7	11	23	36
4	Batanghari	12	10	13	5	8	10	12	12	12	23
5	Muaro Jambi	23	19	18	9	15	5	5	6	6	17
6	Tanjung Jabung Timur	12	9	22	22	24	27	31	31	31	16
7	Tanjung Jabung Barat	11	10	10	10	10	11	16	19	17	28
8	Tebo	18	9	7	7	8	6	6	6	6	18
9	Bungo	31	53	34	38	38	44	47	48	48	36
10	Kota Jambi	28	24	26	9	12	139	142	142	142	151
11	Kota Sungai Penuh	19	18	8	7	11	15	16	16	16	25
TOTAL		279	275	288	226	250	425	445	456	466	533

Pertumbuhan rata-rata DTW selama periode 2010-2019 adalah 6,69 %

B. Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DT) Alam di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

No.	Kabupaten / Kota	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	48	49	70	70	71	97	98	98	98	95
2	Merangin	17	18	16	8	9	20	20	20	20	33
3	Sarolangun	13	16	16	6	6	5	5	5	5	19
4	Batanghari	4	2	3	1	2	3	3	3	3	8
5	Muaro Jambi	4	2	3	1	3	2	2	2	2	3
6	Tanjung Jabung Timur	4	6	15	15	17	18	20	20	20	8
7	Tanjung Jabung Barat	4	5	3	3	3	4	8	8	6	10
8	Tebo	6	6	3	3	3	3	3	3	3	9
9	Bungo	14	16	20	20	20	24	26	26	26	20
10	Kota Jambi	6	6	6	1	2	3	3	3	3	3
11	Kota Sungai Penuh	5	4	3	3	5	5	5	5	5	7
TOTAL		125	130	158	131	141	184	193	193	191	215

Pertumbuhan rata-rata DTW alam selama periode 2010-2019 adalah 5,57 %

C. Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DT) Buatan di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

No.	Kabupaten / Kota	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	4	3	19	8	8	9	10	12	12	28
2	Merangin	8	6	8	3	3	7	7	7	7	10
3	Sarolangun	6	2	8	2	2	0	0	4	16	12
4	Batanghari	6	6	7	3	3	4	4	4	4	8
5	Muaro Jambi	12	11	12	3	3	2	2	3	3	12
6	Tanjung Jabung Timur	3	1	7	0	0	1	1	1	1	3
7	Tanjung Jabung Barat	6	5	5	2	2	2	3	6	6	16
8	Tebo	4	0	4	0	0	2	2	2	2	3
9	Bungo	7	7	8	6	6	7	8	9	9	11
10	Kota Jambi	14	13	15	5	5	74	77	77	77	94
11	Kota Sungai Penuh	1	1	3	2	2	4	5	5	5	8
TOTAL		71	55	96	34	34	112	119	130	142	205

Pertumbuhan rata-rata DTW buatan selama periode 2010-2019 adalah 11,19 %

D. Pertumbuhan Daya Tarik Wisata (DTW) Sejarah/Budaya di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019

No.	Kabupaten / Kota	Tahun									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerinci	3	15	8	19	20	20	20	20	20	15
2	Merangin	6	4	3	2	3	8	8	8	8	2
3	Sarolangun	2	10	2	1	2	2	2	2	2	5
4	Batanghari	6	2	3	1	3	3	5	5	5	7
5	Muaro Jambi	11	6	3	5	9	1	1	1	1	2
6	Tanjung Jabung Timur	1	2	0	7	7	8	10	10	10	5
7	Tanjung Jabung Barat	5	0	2	5	5	5	5	5	5	2
8	Tebo	0	3	0	4	5	1	1	1	1	6
9	Bungo	7	30	6	12	12	13	13	13	13	5
10	Kota Jambi	13	5	5	3	5	62	62	62	62	54
11	Kota Sungai Penuh	1	13	2	2	4	6	6	6	6	10
TOTAL		55	90	34	61	75	129	133	133	133	113

Pertumbuhan rata-rata DTW Sejarah/Budaya selama periode 2010-2019 adalah 17,47 %

{a} *Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.*

- Terlaksananya fasilitasi sertifikasi tenaga profesi pemandu wisata umum dengan jumlah peserta 30 pemandu wisata dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dari tanggal 25 s.d. 27 September 2019 di Hotel Grand Abadi. Ujian kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pramindo. Dari 30 peserta yang mengikuti uji kompetensi, 29 peserta dinyatakan lulus dan berhak mendapat sertifikat; 4 pemandu dari Kabupaten Merangin, 5 pemandu dari Kota Sungai Penuh, 5 pemandu dari Kabupaten Muaro Jambi, 2 pemandu dari Kota Jambi, 2 pemandu dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 pemandu dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 7 pemandu dari Kabupaten Kerinci dan 2 pemandu dari Kabupaten Sarolangun.

Permasalahan dan solusi

- Permasalahan pada kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata adalah belum terakomodirnya peningkatan kompetensi SDM pariwisata yang tersertifikasi mengingat anggaran yang tersedia hanya untuk 30 orang.
- Kabupaten/kota melakukan seleksi lokal pemandu yang akan disertifikasi dan melakukan *sharing* ilmu dengan pemandu lain yang belum disertifikasi. Peningkatan kompetensi pemandu juga perlu dilakukan dengan belajar langsung ke daerah-daerah yang telah memiliki program pengembangan SDM pemandu terpadu.

C.2.4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program ini adalah meningkatkan efektifitas pemasaran pariwisata dengan anggaran Rp. 2.602.388.362,-

Realisasi pelaksanaan program kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata Rp.151.368.000, Realisasi Rp.148.763.880,- (98.28%)
2. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Rp.130.414.725, Realisasi Rp. 130.414.725,-(100%)
3. Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri Rp.339.158.000, Realisasi RP.338.516.348,- (99.81%)
4. Promosi Pariwisata di Dalam Daerah Rp. 1.981.447.637, Realisasi Rp. 1.901.092.001,-(95.94 %)

C.2.4.1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri telah dilaksanakan:

- Partisipasi pada pameran Batam Investment, Tourism and Trade Expo 2019 pada tanggal 25 s.d. 28 April 2019 di Nagoya Hill, Kota Batam dan memperoleh predikat stand terbaik bidang informasi pariwisata.
- Partisipasi pada event Indonesia .International Outdoor Festival 3rd Summit 2019 pada tanggal 1 s.d 4 Agustus 2019 di Lapangan Aldiron-Pancoran, Jakarta Selatan.
- Partisipasi pada pameran Batam ITT Expo pada tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2019 di Mega Mall, Batam Center, Kota Batam dan mendapat penghargaan sebagai stand pameran terbaik.
- Apresiasi Pesona Wisata Jambi 2019 pada tanggal 24 September 2019 di Kawasan Tanggo Rajo, Kota Jambi. Kategori penghargaan yang diberikan adalah Event Promosi Pariwisata Daerah, Event Pariwisata Inovatif, Pengelola Daerah Tujuan Wisata, Apresiasi Stand Pameran Kepariwisata Terbaik dan Stand Terbaik Promosi Daerah

C.2.4.2 Kegiatan Promosi Pariwisata Dalam Daerah (Event Daerah).Telah dilaksanakan:

- Cetak bahan promosi sebanyak 8.175 eksemplar berupa goody bag, paper bag, booklet pariwisata, souvenir, DVD pariwisata Jambi. Jumlah bahan promosi belum tercapai realisasinya

dikarenakan terbatasnya anggaran dan biaya cetak pada saat eksekusi mengalami kenaikan.

- Pemberian dukungan publikasi media cetak dan elektronik pada event Festival 1 Muharram, Festival Batanghari, Festival Kerinci, Kerintji Mountain Bike Cross Country, Waisak Bersama, Tapa Malenggang dan Gelar Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi pada HUT ke-62 Provinsi Jambi. Selain publikasi pendukung juga diberikan dalam bentuk fasilitasi panggung hiburan dan tenda pameran pada Festival Batanghari, penyediaan sound system pada Festival Kerinci dan pelaksanaan kegiatan Kerintji MTB sebagai rangkaian kegiatan Festival Kerinci. Jumlah pelaksanaan event, partisipasi dan supporting pada eventgt dalam belum tercapai dikarenakan adanya dukungan event Tour de Singkarak etape Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang membutuhkan biaya supporting anggaran yang relatif besar.

C.2.4.3 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Telah dilaksanakan Stakeholder Meeting 2019 pada tanggal 22 dan 23 April 2019 di Hotel Odua Weston yang diikuti 22 stakeholders baik dari pemerintah maupun swasta. Materi pertemuan ini adalah peningkatan promosi Jambi melalui wisata tematik sebagai motivasi laju kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi dan penyusunan konsep wisata tematik.

c.2.4.4. Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata.

Telah dilaksanakan pengelolaan website www.explorejambi.com. Selama tahun 2019 tercatat 521.464 hit dari 220.680 pengakses. Instagram *@jambi_tourism* dengan follower lebih kurang 4.658 akun dan mendapat penghargaan sebagai Juara II kategori Promosi Pariwisata Digital Terpopuler pada event Anugerah Pesona Indonesia 2019. Selain itu Disbudpar juga menggunakan akun sosial media lain yaitu Facebook *@pariwisatajambi.prov* dan Youtube *Disbudpar Prov. Jambi* sebagai media promosi video pariwisata.

Permasalahan dan Solusi

- Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata melalui kegiatan Promosi Pariwisata di Dalam Daerah masih dapat dimaksimalkan lagi kedepan, guna peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara ataupun wisatawan domestik. Ditahun 2019 kegiatan Promosi Pariwisata di Dalam Daerah terealisasi sebesar 95,94 persen dari total anggaran Rp. 1.981.447.637, dengan melakukan kegiatan promosi sebanyak 11 (sebelas) kegiatan promosi dan Festival, selisih 4,06 % merupakan selisih harga perkiraan antara belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan dari anggaran perencanaan.
- Pada Rancangan anggaran Belanja untuk tahun 2020 telah dilakukan *update* sesuai dengan survey kenaikan harga barang dan jasa terbaru yang dilakukan secara langsung dari unit kerja di Bidang pengembangan Pemasaran Pariwisata. Diharapkan melalui updating harga barang dan jasa akan mengurangi selisih penganggaran terhadap realisasi yang akan membuat kinerja keuangan pada bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menjadi lebih baik.
- Secara umum jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Provinsi Jambi relatif stabil namun ada beberapa kendala baik secara Natural seperti kebakaran hutan dan lahan perkebunan maupun secara Global yaitu kenaikan tarif transportasi udara, walaupun kendala tersebut berada di luar control kita tetapi strategi pemasaran yang tepat dapat menjaga jumlah kunjungan wisatawan tersebut.

D. DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

D.1. Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi menerima dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata RI sebesar Rp. 1.565.012.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta dua belas ribu rupiah) berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-040.01.3.100109/2019 tanggal 5 Desember 2018.

D.1.1. Satker Pelaksana

Program dan kegiatan dekonsentrasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dilaksanakan oleh 2 (dua) satker yaitu Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang mana teknis pelaksanaannya didasarkan artas tugas pokok dan fungsi bidang terkait.

D.1.2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Berikut pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi 2019 sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
 - Layanan Perencanaan
 - ❖ Realisasi fisik adalah sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,94%
- b. Program Pengembangan Kepariwisata
 - Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China
 - Familiarization Trip yang rencananya diikuti stakeholders dari China pada bulan Desember tidak terlaksana karena stakeholders yang diundang tidak dapat berpartisipasi sehubungan dengan dekatnya perayaan tahun baru China.
 - ❖ Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 17% dan realisasi fisik 0%.
 - Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, dan Thailand dan Indochina.
 - Pendukung pada 5 (lima) event kepariwisataan; Festival Kerinci, Festival dan Karnaval Angso Duo, Festival Tapa Malenggang, Batanghari Festival dan Pekan Harmoni Sungai Penuh (Kenduri Sko) berupa publikasi media cetak dan elektronik, *memorable goods*, baliho, spanduk, *backdrop*, umbul-umbul, tenda, dokumentasi, konsumsi dll.

- ❖ Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 98,10% dan realisasi fisik 100%.
- Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei.
- Partisipasi Daerah pada MATTA Fair 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Juli 2019 dengan mengikutsertakan travel agent yang ada di Jambi.
- Familiarization Trip pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2019 dengan mengundang 5 orang dari tour and travel agent dan media cetak Malaysia untuk mengunjungi destinasi wisata di Muaro Jambi Kota Jambi dan kawasan Kerinci.
- Kegiatan ini merupakan alternatif event *direct selling* di Asia Tenggara yang tidak dapat diikuti karena jadwal yang bersamaan dengan event daerah.
Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan pemasaran pariwisata wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei ini adalah 98,55 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
- Kegiatan Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga.
- Pelatihan Dasar Pelaku Pemandu Wisata
- Pelatihan Dasar Kepariwisata Goes to School bagi 560 orang pelajar dan guru-guru SMK/SMA di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh pada bulan April dan Mei 2019. Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 99,81% dan realisasi fisik 100%
- Pengembangan Masyarakat Pariwisata
- Workshop Pembinaan Sadar Wisata di Desa Air Batu, Kabupaten Merangin pada bulan April 2019 diikuti 50 peserta dari masyarakat sekitar desa wisata.
- Pelatihan Pengelola Homestay di Kabupaten Kerinci diikuti 50 peserta pengelola homestay pada bulan Mei 2019
Realisasi keuangan kegiatan ini adalah 99,99% dan realisasi fisik 100%.

Secara keseluruhan dari anggaran sebesar Rp. 1.565.012.000,- realisasi capaian keuangan dan fisik adalah Rp. 1.439.279.704,- atau 91,97%.

Permasalahan dan Solusi

Pada Program Pengembangan Pariwisata Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China tidak terlaksana dikarenakan *stakeholder* pariwisata yang bermitra dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak berkenan dengan pola *sharing* pembiayaan yang ada dalam anggaran kegiatan. Kemudian partisipasi event promosi ke China tersebut dialihkan menjadi kegiatan Famtrip ke Jambi yang mana pesertanya adalah *stakeholder* pariwisata dari China, namun kegiatan ini juga tidak terlaksana dikarenakan jadwal pelaksanaan famtrip bersamaan dengan persiapan menghadapi perayaan Tahun Baru China (Imlek).

BAB. VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Terima kasih kami tidak lupa disampaikan kepada segenap jajaran pegawai lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Jambi, Januari 2020

Pt. KEPALA DINAS,

DR. SRI PURNAMA SYAM, S.ST.M.Sn
Pembina Tk
NIP. 19690101 199403 2010

